RENCANA KERJA

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KUDUS**

Jl. Conge- Ngembalrejo Nomor 99 Kudus
Telp/Fax (0291) 438691
Kudus 59322

DAFTAR ISI

BAB I.	**PENDAHULUAN**		**3**
	1.1.	Latar Belakang	3
	1.2	Landasan Hukum	6
	1.3	Maksud dan Tujuan	11
	1.4	Sistematika Penulisan	11
BAB II.	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKEPERINKOP DAN UKM KAB. KUDUS TAHUN LALU**		**13**
	2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019 dan perkiraan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.	25
	2.3	Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus	27
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
BAB III.	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**		**47**
	3.1	Telaahan Kebijakan Nasional	47
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2023	48
	3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023	49
BAB IV.	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KUDUS**		**59**
BAB V.	**PENUTUP**		**60**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus tahun 2023 merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus secara normatif disusun untuk memenuhi tahapan dalam penyediaan dokumen perencanaan suatu Perangkat Daerah.

Tata cara, sistematika dan substansi penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sebagai bentuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta implementasi dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dengan terbitnya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada keterkaitan SIPD dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah. SIPD adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam upaya untuk memenuhi informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah serta informasi lainnya secara bertahap dari pola secara manual ke sistem elektronik.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai dasar acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 menggunakan SIPD.

Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui hasil capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja PD. Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023. Proses penyusunan Renja PD dimulai dari :

1. Persiapan penyusunan Renja PD
2. Penyusunan rancangan awal Renja PD
3. Penyusunan rancangan Renja PD
4. Pelaksanaan forum PD/lintas PD
5. Perumusan rancangan akhir Renja PD
6. Penetapan Renja PD

Adapun alur Proses Tahapan Penyusunan Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1

Bagan Alur Proses Tahapan Penyusunan Renja SKPD

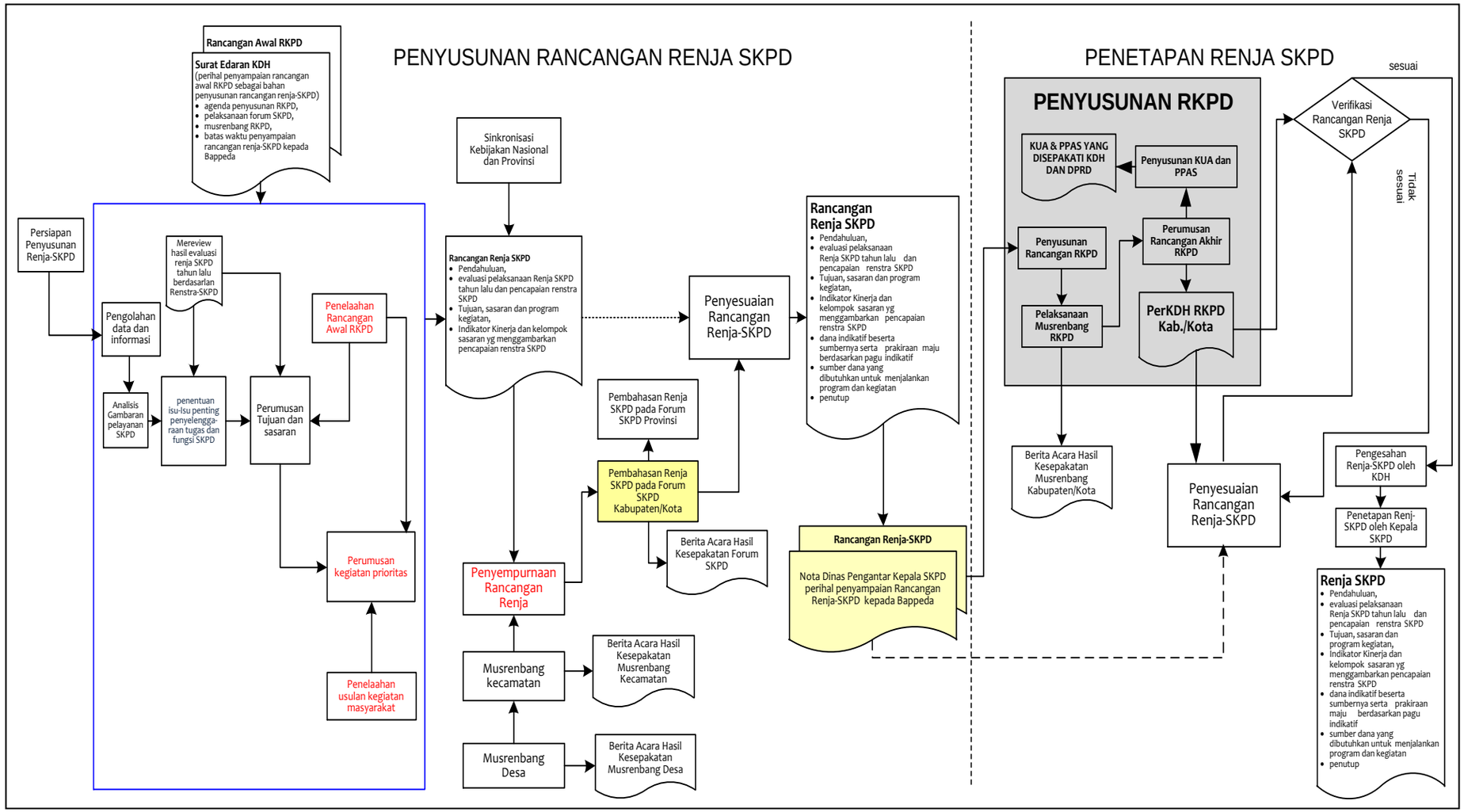

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan pada kondisi, potensi, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat dibidang tenaga kerja, perindustrian, Koperasi dan UKM dan transmigrasi yan`g tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kudus serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

1.2. Landasan Hukum

RKPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
36. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3);
37. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus yaitu untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan OPD setelah adanya anggaran kegiatan, serta menggambarkan target capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja OPD.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus yaitu:

1. Mendeskripsikan tentang program – program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus beserta pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Rencana Kerja yang ada pada OPD dengan visi misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus;
3. Menjamin terciptanya pemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada pada OPD secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus

2.4. Review terhadap Rancangan Awal PD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KUDUS TAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan program, kegiatannya dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus memiliki target pendapatan sebesar Rp.59.350.000,- dengan realisasi anggaran Rp 147.900.000,- (249,20%). Sumber pendapatan berasal dari penerimaan sewa gedung, pengujian laboratorium tar dan nikotin dan sewa aula pada LIK IHT Megawon sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2018. Tingginya capaian realisasi pendapatan yang melebihi target dikarenakan pertumbuhan industri rokok baru pada Tahun 2021 meningkat, dari 66 industri rokok di Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 78 industri rokok di Tahun 2021.

Penyerapan anggaran belanja Dinas dari total anggaran belanja sebesar Rp 64.964.143.960,- sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 13.254.900.168,- atau sekitar 20,40%.

Realisasi Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 sebanyak 9 (sembilan) program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Dari 9 (sembilan) program tersebut ada yang realisasi kinerjanya dibawah target. Secara rinci target kinerja akan diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan dan sub kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan indikator persentase pencari Kerja yang sudah bekerja sebesar 46 % realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 39%, serapan anggaran sebesar 89,29%. Kegiatan dan sub kegiatan program tesebut adalah sebagai berikut:
   - Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
     - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator persentase pencari Kerja yang sudah bekerja sebesar 46 % realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 39%, serapan anggaran sebesar 68,18 %. Kegiatan dan sub kegiatan program tesebut adalah sebagai berikut:
   - Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
     - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
     - Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator persentase pencari Kerja yang sudah bekerja sebesar 46 % realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 39%, serapan anggaran sebesar 70,43 %. Kegiatan dan sub kegiatan program tesebut adalah sebagai berikut:
   - Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
     - Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja.

- Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online.
    - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator presentase koperasi aktif sebesar 88,50% realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 86,33%, dan serapan anggaran sebesar 94,15%. Kegiatan dan sub kegiatan program tesebut adalah sebagai berikut:
    - Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar 5,25% realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 5,19%, serapan anggaran sebesar 14,02 %. Kegiatan dan sub kegiatan program tesebut adalah sebagai berikut:
    - Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
        - Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
        - Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
        - Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator persentase calon transmigran yang terfasilitasi sebesar 25% realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 0 %, serapan anggaran sebesar 66,40 %.
    - Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ keluaran yang direncanakan.

a. Program Hubungan Industrial dengan indikator Persentase Kasus yang terselesaikan sebesar 100 % realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 100 %, serapan anggaran sebesar 96,20 %. Kegiatan dan sub kegiatan program tesebut adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

3. **Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Naker) sebesar 83 % realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 84,74 %, serapan anggaran sebesar 92,08 %. Kegiatan dan sub kegiatan program tesebut adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator persentase pertumbuhan IKM sebesar 0,3 % realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 0,32 %, serapan anggaran sebesar 2,65 %. Kegiatan dan sub kegiatan program tesebut adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
  - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

4. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja , serta Program Penempatan Tenaga Kerja memiliki indikator persentase pencari Kerja yang sudah bekerja sebesar 46 % realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 39%.

Tidak terpenuhinya target tersebut karena dampak terjadinya pandemi corona virus disease 2019 (*covid19*) masih berpengaruh terhadap geliat dunia usaha yang belum optimal menjalankan usahanya yang berdampak terhadap rendahnya penyerapan tenaga kerja sehingga banyak pengangguran.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator presentase koperasi aktif sebesar 88,50% realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 86,33%.

Tidak terpenuhinya target tersebut karena jumlah koperasi aktif berkurang sebanyak 6 koperasi, penurunan jumlah koperasi aktif tersebut disebabkan kapasitas kelembagaan koperasi masih belum optimal perlu didukung kompetensi SDM pengelola koperasi dan adanya persaingan perkembangan lembaga keuangan di luar koperasi yang makin menjamur.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar 5,25% realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 5,19%, serapan anggaran sebesar 14,02 %.
   Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan penjualan pelaku UMKM mengalami penurunan dan hampir semua pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perbankan pada saat pandemi covid-19.
   Rendahnya serapan anggaran dikarenakan penyaluran bantuan modal usaha bagi wirausaha tidak dapat direalisasikan. Prosedur dan pengusulan proposal dari pelaku usaha sebagai salah satu syarat administrasi belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial.

d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator persentase calon transmigran yang terfasilitasi sebesar 25% realisasi capaian kinerja sampai Triwulan IV adalah 0 %.
   Tidak adanya calon transmigran yang difasilitasi keberangkatan karena Kabupaten Kudus tidak mendapatkan kuota keberangkatan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Banyaknya Perusahaan baru di wilayah Kabupaten Kudus menyebabkan animo masyarakat untuk ikut transmigrasi berkurang.

5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.**

   Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, menyebabkan belum optimalnya penanganan angkatan kerja dan pengembangan Koperasi dan UMKM sehingga target pencari kerja yang bekerja serta peningkatan koperasi aktif dan perkembangan UMKM tidak dapat tercapai.

6. **Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:**

   a. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait kebijakan ketenagakerjaan sebelum tahap perencanaan;
   b. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait kebijakan pengembangan KUKM sebelum tahap perencanaan;
   c. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait kebijakan transmigrasi sebelum tahap perencanaan;
   d. Penentuan skala prioritas terkait program/kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan isu strategis masing-masing bidang urusan pada saat perencanaan dan penganggaran.
   e. Peningkatan ketelitian dalam pembuatan dokumen perencanaan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 selengkapnya diuraikan sebagaimana Tabel 2.1. di bawah ini:

Tabel 2.1(T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kab. Kudus

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangakt Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=10/4
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Naker)**	**85**	**80,67**	**83**	**84,74**	**102,10**	**83,5**	**83,82**	**100,38**
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok		12 dok	12 dok	100%	1 dok	1dok	100%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	1 dok		53 org	53 org	100%	1 dok	1 dok	100%
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Administrasi Umum Perangkat daerah	1 dok		12 bln	12 bln	100%	1 dok	1 dok	100%
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan triwulanan penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemda	1 dok		12 bln	12 bln	100%	1 Dok	1 Dok	100%
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Dokumen laporan triwulanan	1 dok		12 bln	9 bln	75 %	1 unit	1 unit	100%

	Pemerintahan Daerah	pemeliharaan Barang Milik Daerah								
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari Kerja yang sudah bekerja**	**50%**		**46%**	**39 %**	**84,78%**	**48%**	**42,39 %**	**88,31%**
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Pelaporan Penyusunan RTK	**1 dok**		1 dok	1 dok	100 %	1 dok	0 dok	0%
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pencari Kerja yang sudah bekerja**	**50%**		**46%**	**39 %**	**84,78%**	**48%**	**42,39 %**	**88,31%**
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit kompetensi	1 dok		14 kgt	10 kgt	71,43 %	1 dok	0 dok	0 %
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari Kerja yang sudah bekerja**	**50%**		**46%**	**39 %**	**84,78%**	**48%**	**42,39 %**	**88,31%**
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan triwulanan pelayanan antar kerja	**1 dok**		11 kgt	5 kgt	45,45%	1 dok	1 dok	100 %
2.07.04.2.02	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pengelolaan Informasi pasar kerja	1 dok		9 kgt	9 kgt	100 %	1 dok	1 dok	100 %
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Kasus yang terselesaikan**	100 %		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pengesahan Peraturan Perusahaan, Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	1 dok		3 kgt	1 kgt	33,33%	1 dok	1 dok	100%

2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kab. Kudus	1 dok		4 kgt	1 kgt	25%	1 dok	1 dok	100%
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi aktif**	89%		88,50 %	86,33 %	97,55 %	88,75%	35,5 %	40%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Triwulanan Diklat Perkoperasian	1 dok		2 kgt	2 kgt	100 %	1 dok	1 dok	100%
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**	**5,75 %**		**5,25%**	**5,19%**	**98,86 %**	**5,5%**	**2,2 %**	**40 %**
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen laporan triwulanan pendataan dan pemberdayaan usaha mikro	1 dok		19 kgt	8 kgt	50 %	1 dok	1 dok	100%
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pertumbuhan IKM**	**0,4 %**		0,3%	0,32%	106,67 %	0,35%	0,14%	40%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Triwulanan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	1 dok		16 kgt	3 kgt	18,75 %	1 dok	1 dok	100%

3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**persentase calon transmigran yang terfasilitasi**	**25%**		**25%**	**0 %**	**0%**	**25%**	**0%**	**0%**
3.32.03.2.01.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan triwulanan Penataan Persebaran Penduduk	1 dok		1 kgt	1 kgt	100%	1 dok	1 dok	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.

Dalam menganalisa kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus 2018 – 2023

Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus selengkapnya dapat dilihat sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	-	72,25	72,35	72,45	72,55	72,65	71,83	74,50	74,77	72,65	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	3,30	3,25	3,15	3,05	2,90	3,86	5,53	3,77	2,90	
3.	Persentase penyelesaian kasus PHI / PHK	-	-	100	100	100	100	100	90	100	100	100	
4.	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	70,50	71,00	72,00	73,00	74,00	72,67	57,51	76,63	74,00	
5.	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	-	-	81,10	81,20	81,30	81,40	81,50	80,39	79,92	79,64	81,50	
6.	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	-	-	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,21	0,25	0,32	0,40	
7.	Persentase Perkembangan UMKM	-	-	4,75	5,0	5,25	5,50	5,75	4,72	4,85	5,19	5,75	
8.	Persentase Koperasi Aktif	-	-	88,00	88,25	88,50	88,75	89,00	89,00	86,33	86,33	89,00	

2.3 Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus

Di dalam dokumen RPJMD 2018 – 2023 dan perencanaan tingkat SKPD yaitu Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus mempunyai peran dalam berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kudus lima tahun ke depan khususnya pada Misi IV yaitu memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Upaya mengemban misi tersebut Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan program dan kegiatan melakukan beberapa tinjauan aspek serta mengacu pada arus utama isu – isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kudus guna meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tantangan serta peluang dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,77 % lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 3,15%. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas dunia usaha dan perusahaan pada saat pandemi covid-19 belum optimal menjalankan usahanya sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi rendah dan banyak pengangguran. Namun, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 perlahan mulai membaik, hal ini ditandai dengan bangkitnya aktivitas dunia usaha dan perusahaan yang mulai membuka lapangan kerja sehingga menjadikan peluang untuk menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini juga harus diimbangi dengan kualitas tenaga kerja yang baik melalui pelatihan di BLK.
2. Penguatan kelembagaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro. Jumlah Koperasi aktif pada Tahun 2021 sejumlah 461 unit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 467 unit dan sebanyak 16.290 pelaku usaha mikro masih membutuhkan penguatan modal dan akses pemasaran. Tantangan yang dihadapi dilapangan adalah adanya persaingan dan banyaknya lembaga keuangan di luar koperasi yang makin menjamur serta kualitas SDM Koperasi dan usaha mikro masih rendah. Dengan adanya kebijakan kemudahan berusaha yaitu pendaftaran NIB melalui OSS, menjadikan peluang KUKM untuk

mendapatkan legalitas ijin berusaha sehingga dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Peningkatan kualitas SDM dan pengembangan KUKM perlu didorong dan ditingkatkan melalui pelatihan manajerial dan vocational sehingga mampu meningkatkan daya saing KUKM.

3. Lemahnya pertumbuhan dan daya saing industri kecil dan menengah. Sebanyak 4.336 IKM pada tahun 2021 di Kabupaten Kudus masih mengalami berbagai kendala, antara lain lemahnya daya saing produk IKM karena mutunya yang belum memadai, desain yang belum berorientasi pasar, ketersediaan bahan baku kurang terjamin, lemahnya akses terhadap permodalan dan pemasaran, serta rendahnya kemampuan manajemen dan teknologi. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan sektor industri melalui program-program untuk meningkatkan daya saing industri, antara lain kemudahan perijinan melalui OSS, meningkatkan kemampuan SDM, kualitas dan disain produk melalui pelatihan, meningkatkan teknologi melalui restrukturisasi mesin peralatan, meningkatkan pemasaran melalui fasilitasi pameran di dalam dan luar negeri.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.

Adapun tahapan-tahapan review yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD
b. Membandingkan dan merumuskan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
c. Menuangkan data dalam bentuk tabel matriks sehingga mempermudah dalam mengolah dan menyajikan data.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kudus melaksanakan menyelenggarakan 10 Program, 18 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3 (T-C.31)

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Kudus***	***Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (naker)***	***85 indeks***	***9.912.928.716***	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Kudus***	***Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (naker)***	***85 indeks***	***9.912.928.716***	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kudus**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar**	**10 Dok**	**5,573,656**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kudus**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar**	**10 Dok**	**5,573,656**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kudus	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	3,503,656	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kudus	Jumlah dokumen Renja yang tersusun	6 Dok	3,503,656	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kudus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	2,070,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kudus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	2,070,000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kudus**	**Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart**	**12 laporan**	**7,938,600,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kudus**	**Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart**	**12 laporan**	**7,732,550,660**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kudus	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 org	7,879,100,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kudus	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 org	7,669,418,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kudus	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	59,500,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kudus	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	59,500,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kudus	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dok	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kudus	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dok	3,632,660	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kudus**	**Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar**	**85 persen**	**123,257,500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kudus**	**Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar**	**85 persen**	**171,789,300**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kudus	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	6,043,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kudus	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	6,043,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kudus	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	22,772,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kudus	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	30,148,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kudus	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	8,041,000	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kudus	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	8,041,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kudus	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	36,335,100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kudus	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	41,445,100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kudus	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 dok	2,791,400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kudus	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 dok	4,767,200	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kudus	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	20 Laporan	4,800,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kudus	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	20 Laporan	4,800,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kudus	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket	42,475,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kudus	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket	76,545,000	
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kudus**	**Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)**	**0**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kudus**	**Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)**	**0**	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Kudus	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	**Kudus**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kudus**	**Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan**	**36 lap**	**1,809,539,700**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kudus**	**Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan**	**36 lap**	**1,807,139,700**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kudus	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kudus**	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 lap	6.000.000	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kudus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	383,996,700	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	**Kudus**	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	412,796,700	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kudus	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	1,419,543,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kudus**	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	1,388,343,000	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kudus**	**Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar**	**58 unit**	**114,314,200**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kudus**	**Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar**	**58 unit**	**195,875,400**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kudus	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 unit	106,435,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kudus	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	47 unit	179,956,400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kudus	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	7,879,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kudus	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	15,919,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kudus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kudus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kudus	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kudus	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	
II	***PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA***	**Kudus**	***Persentase pencari Kerja yang sudah bekerja***	***50 persen***	**9,883,200**	***PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA***	**Kudus**	***Persentase Perusahaan yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja***	***2 persen***	**9,883,200**	
1	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kudus**	**Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro**	**3 perusahaan**	**9,883,200**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kudus**	**Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro**	**3 perusahaan**	**9,883,200**	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kudus	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	3 perusahaan	9,883,200	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kudus	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	3 perusahaan	9,883,200	
III	***PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA***	**Kudus**	***Persentase pencari Kerja yang sudah bekerja***	***50 persen***	***8,063,709,400***	***PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA***	**Kudus**	***Persentase Peserta Pelatihan Bersertifikasi Kompetensi***	***50 persen***	***8,063,709,400***	
1	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**1 dok**	**8,053,709,460**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**1 dok**	**8,053,709,460**	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kudus	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	2384 Orang	8,053,709,460	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kudus	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	2384 Orang	8,053,709,460	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kudus**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**	**5 LPKS**	**9,999,940**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kudus**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**	**5 LPKS**	**9,999,940**	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kudus	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 LPKS	9,999,940	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kudus	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 LPKS	9,999,940	
IV	***PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA***	**Kudus**	***Persentase pencari Kerja yang sudah bekerja***	***50 persen***	**49,901,220**	***PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA***	**Kudus**	***Persentase pencari Kerja yang sudah bekerja***	***50 persen***	**49,901,220**	
1	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**1 dok**	**14,999,800**	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**1 dok**	**14,999,800**	
	Pelayanan antar Kerja	**Kudus**	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 orang	14,999,800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	**Kudus**	Jumlah kegiatan usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	50 orang	14,999,800	
2	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**1 dok**	**29,999,720**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**1 dok**	**29,999,720**	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kudus	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	29,999,720	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kudus	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	29,999,720	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**1 do1k**	**4,901,700**	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**1 dok**	**4,901,700**	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kudus	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	100 0rang	4,901,700	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kudus	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	100 orang	4,901,700	
V	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kudus**	**Persentase Kasus yang terselesaikan**	**100 persen**	**59,358,695**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kudus**	**Persentase Kasus yang terselesaikan**	**100 persen**	**59,357,847**	
1	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kudus**	Jumlah Dokumen Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	**45,000,000**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kudus**	Jumlah Dokumen Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**1 Dok**	**44,999,152**	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	**Kudus**	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 perusahaan	1,000,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	**Kudus**	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 perusahaan	1,000,000	
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	**Kudus**	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 perusahaan	1,000,000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	**Kudus**	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 perusahaan	1,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	**Kudus**	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 dok	43,000,000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	**Kudus**	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 dok	42,999,152	
2	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dok**	**14,358,695**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dok**	**14,358,695**	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kudus**	Jumlah Perusahaan yang Dibina	30 perusahaan	995,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kudus**	Jumlah Perusahaan yang Dibina	30 perusahaan	995,000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kudus**	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2 perkara	1,000,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kudus**	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2 perkara	1,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	**Kudus**	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 organisasi	2,000,000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	**Kudus**	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 organisasi	2,000,000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	**Kudus**	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 lembaga	9,461,695	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	**Kudus**	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 lembaga	9,461,695	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	**Kudus**	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10 perusahaan	902,000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	**Kudus**	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10 perusahaan	902,000	
VI	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kudus**	**persentase koperasi aktif**	**89 persen**	**34,999,890**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kudus**	**persentase koperasi aktif**	**89 persen**	**34,999,890**	
1	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kudus**	**Jumlah dokumen laporan tahunan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dok**	**34,999,890**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kudus**	**Jumlah dokumen laporan tahunan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dok**	**34,999,890**	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	**Kudus**	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 orang	34,999,890	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	**Kudus**	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 orang	34,999,890	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kudus**	**Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**	**6 persen**	**2,104,938,372**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kudus**	**Persentase Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil dan Menengah**	**3 persen**	**2,137,129,457**	
1	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kudus**	**Jumlah dokumen laporan tahunan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**1 Dok**	**2,104,938,372**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kudus**	**Jumlah dokumen laporan tahunan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**1 Dok**	**2,137,129,457**	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	**Kudus**	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro lah wirausaha yang menerima hibah bantuan modal usaha	64 unit usaha 500 orang	2,104,938,372	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	**Kudus**	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro lah wirausaha yang menerima hibah bantuan modal usaha	64 unit usaha 500 orang	2,137,129,457	
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kudus**	**Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**	**6 persen**	**49,999,795**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kudus**	**Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**	**6 persen**	**639.971.765**	
1	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Kudus**	**Jumlah dokumen laporan tahunan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**1 Dok**	**49,999,795**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Kudus**	**Jumlah dokumen laporan tahunan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**1 Dok**	**639.971.765**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	**Kudus**	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30 orang	49,999,795	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	**Kudus**	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30 orang	639.971.765	
IX	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Kudus**	**Peningkatan Pertumbuhan IKM**	**0,4 persen**	**32,219,837,840**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Kudus**	**Peningkatan Pertumbuhan IKM**	**0,4 persen**	**29,641,713,870**	
1	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Penyusunan dan Evaluasi RPIK**	**1 Dok**	**32,219,837,840**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Penyusunan dan Evaluasi RPIK**	**1 Dok**	**29,641,713,870**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	**Kudus**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8 dok	22,014,837,840	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	**Kudus**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8 dok	4,026,854,730	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	**Kudus**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 dok	10,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	**Kudus**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 dok	25,409,859,140	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	**Kudus**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan Peran Serta Masyarakat	2 dok	200,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	**Kudus**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan Peran Serta Masyarakat	2 dok	200,000,000	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	**Kudus**	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	5,000,000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	**Kudus**	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Kudus**	Persentase pertumbuhan IKM	0,40 %	0	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**Kudus**	Persentase pertumbuhan IKM	0 persen	0	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kudus**	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	0	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kudus**	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 dok	0	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	**Kudus**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dok	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	**Kudus**	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dok	0	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Kudus**	**Peningkatan pertumbuhan IKM**	**0,40 persen**	**0**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Kudus**	**Peningkatan pertumbuhan IKM**	**0 persen**	**0**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1 dok**	**0**	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**0 dok**	**0**	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kudus	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dok	0	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kudus	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	0 dok	0	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAS	**Kudus**	**persentase calon transmigran yang terfasilitasi**	**25 %**	**2,999,000**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Kudus**	**persentase calon transmigran yang terfasilitasi**	**25 %**	**2,999,000**	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota**	**1 Dok**	**2,999,000**	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kudus**	**Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota**	**1 Dok**	**2,999,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kudus	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	2,999,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kudus	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	2,999,000	
	TOTAL				**52,585,608,812**			**Total**		**50,552,594,365**	

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses pengusulan Program dan Kegiatan yang disampaikan masyarakat yang diawali dari Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan maupun melalui Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Legislator sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Usulan kegiatan dari masyarakat sudah sesuai dengan isu-isu strategis dalam rangka pembangunan tenaga kerja, perindustrian, Koperasi dan UMKM. Adapun usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 yang terangkum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kudus

Nama Perangkat Daerah : Dinas tenaga kerja, perindustrian, Koperasi dan UMKM

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Kabupaten Kudus	Persentase Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil dan Menengah	5,75 Persen	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kabupaten Kudus	Jumlah dokumen laporan tahunan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1 dok	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Kudus	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Jumlah wirausaha yang menerima hibah bantuan modal usaha	64 Unit 100 Kelompok (500 Orang)	
		Rt. 4 Rw. 3 Desa Pedawang, Kab. Kudus	Bantuan Modal Usaha Kelompok OMAH CEMILAN Desa Pedawang	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Rt. 3 Rw. 1 Desa Bae, Kab. Kudus	Bantuan Modal Usaha Kelompok Remaja Makmur Desa Bae	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Desa Golantepus RT 5 RW 3 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Kab. Kudus	Bantuan Modal Usaha kelompok usaha mandiri LA TANSA Desa Golan tepus RT 5 RW 3 Kec. Mejobo	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		RT 3 RW 2 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kudus, Kab. Kudus	Permohonan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif RT 3 RW 2 Desa Hadiwarno Kec. Mejobo Kudus	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Desa Temulus RT 2 RW 4 Kecamatan Mejobo Kab.Kudus,	Bantuan Usaha Budidaya Ikan Nilaku Desa temulus RT 2 RW 4 Kecamatan Mejobo Kudus	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Rt. 08 Rw. 06 Desa Mijen, Kab. Kudus	Bantuan Usaha TUNAS USAHA MANDIRI Desa Mijen	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Kesambi RT 01 RW 01, Kab. Kudus	Bantuan Pengadaan Produk Dagangan Minimarket Kelompok Usaha Bersama Ngarepan	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Desa Gondangmanis RT 10 RW 06 Bae Kudus, Kab. Kudus	Bantuan Modal Usaha Kelompok Studio Delapan	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Burikan RT 03 RW 05 Kota Kudus, Kab. Kudus	Bantuan Pengadaan Produk Gamis Kelompok Usaha Bersama Nazumi Kudus Anni	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Kutuk, RT 04 RW 03, Kab. Kudus	Bantuan Modal Usaha kepada Kelompok Usaha Pertukangan Mebel Wahyu Jati Desa Kutuk Kec. Undaan Kab Kudus	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Desa Terangmas, Kab. Kudus	Bantuan Modal Usaha kepada Kelompok Usaha Pertukangan Mebel Srikandi Antik Desa Terangmas Kec. Undaan Kab. Kudus	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses pengusulan Program dan Kegiatan yang disampaikan masyarakat yang diawali dari Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan maupun melalui Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Legislator sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Usulan kegiatan dari masyarakat sudah sesuai dengan isu-isu strategis dalam rangka pembangunan tenaga kerja, perindustrian, Koperasi dan UMKM. Adapun usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 yang terangkum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kudus

Nama Perangkat Daerah : Dinas tenaga kerja, perindustrian, Koperasi dan UMKM

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Kabupaten Kudus	Persentase Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil dan Menengah	5,75 Persen	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kabupaten Kudus	Jumlah dokumen laporan tahunan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1 dok	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Kudus	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Jumlah wirausaha yang menerima hibah bantuan modal usaha	64 Unit 100 Kelompok (500 Orang)	
		Rt. 4 Rw. 3 Desa Pedawang, Kab. Kudus	Bantuan Modal Usaha Kelompok OMAH CEMILAN Desa Pedawang	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Rt. 3 Rw. 1 Desa Bae, Kab. Kudus	Bantuan Modal Usaha Kelompok Remaja Makmur Desa Bae	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Desa Golantepus RT 5 RW 3 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Kab. Kudus	Bantuan Modal Usaha kelompok usaha mandiri LA TANSA Desa Golan tepus RT 5 RW 3 Kec. Mejobo	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha

		RT 3 RW 2 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kudus, Kab. Kudus	Permohonan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif RT 3 RW 2 Desa Hadiwarno Kec. Mejobo Kudus	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Desa Temulus RT 2 RW 4 Kecamatan Mejobo Kab.Kudus,	Bantuan Usaha Budidaya Ikan Nilaku Desa temulus RT 2 RW 4 Kecamatan Mejobo Kudus	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Rt. 08 Rw. 06 Desa Mijen, Kab. Kudus	Bantuan Usaha TUNAS USAHA MANDIRI Desa Mijen	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Kesambi RT 01 RW 01, Kab. Kudus	Bantuan Pengadaan Produk Dagangan Minimarket Kelompok Usaha Bersama Ngarepan	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Desa Gondangmanis RT 10 RW 06 Bae Kudus, Kab. Kudus	Bantuan Modal Usaha Kelompok Studio Delapan	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha

		Burikan RT 03 RW 05 Kota Kudus, Kab. Kudus	Bantuan Pengadaan Produk Gamis Kelompok Usaha Bersama Nazumi Kudus Anni	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Kutuk, RT 04 RW 03, Kab. Kudus	Bantuan Modal Usaha kepada Kelompok Usaha Pertukangan Mebel Wahyu Jati Desa Kutuk Kec. Undaan Kab Kudus	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha
		Desa Terangmas, Kab. Kudus	Bantuan Modal Usaha kepada Kelompok Usaha Pertukangan Mebel Srikandi Antik Desa Terangmas Kec. Undaan Kab. Kudus	1 Kelompok	Bantuan modal usaha kepada wirausaha

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Kudus.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional,RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi,RPJM Provinsi, RKPD Provinsi; dan RPJMD Kabupaten Kudus dan RKPD Kabupaten Kudus.

Kebijakan Nasional yang menjadi regulasi bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi wewenang dinas adalah sebagai berikut :

1. Kepastian regulasi dan birokrasi pelayanan yang lebih efektif;
2. Peningkatan keahlian untuk dapat bekerja;
3. Perluasan kesempatan bagi kaum muda untuk berusaha;
4. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan;
5. Peningkatan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal;
6. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM yang berpotensi ekspor, berbasis inovasi dan berdaya saing;
7. Revitalisasi koperasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2023

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah:

a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dalam rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
c. Menjadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKabupaten Kudus dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik.
d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.
e. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.
f. Meningkatkan capaian kinerja terhadap penempatan tenaga kerja, pengurangan pengangguran, pertumbuhan industri kecil menengah dan perkembangan serta peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM yang kokoh berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
g. Meningkatkan pembangunan dibidang ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi dan UMKM secara bertahap dan berkesinambungan.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023

Untuk mewujudkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus tentu perlu mempertimbangkan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan antara lain penyelarasan terhadap Visi,Misi,Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus 2018 – 2023 yaitu :

1. Visi : Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera;
2. Misi ke 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Berdaya Saing;
3. Tujuan Pemerintah Daerah**:** Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah;
4. Sasaran Pemerintah Daerah: Meningkatnya Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Program Pemerintah Daerah : Program Penguatan Industri Rakyat dan Produktivitas Kreatif.
6. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah :
   1) Meningkatkan Kesempatan Kerja;
   2) Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Perkapita;
   3) Pengembangan Peran Koperasi, UKM dalam rangka Penguatan Industri Rakyat
7. Sasaran Strategis Organisasi Perangkat Daerah :
   1) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja;
   2) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
   3) Menigkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja;
   4) Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan
   5) Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah;
   6) Meningkatnya Peran KUKM dalam Rangka Penguatan Industri Rakyat;
   7) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

8. Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah :
    1) Tingkat partisipasi angkatan kerja
    2) Tingkat pengangguran terbuka
    3) Persentase penyelesaian kasus PHI/PHK
    4) Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan
    5) Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah
    6) Persentase perkembangan UMKM
    7) Persentase koperasi aktif.
    8) Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan melalui kerangka kerja logis kinerja yang mendasar pada Tujuan OPD dan Sasaran Strategis OPD.

Pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan melaksanakan 10 program, 18 kegiatan yang terdiri dari 39 sub kegiatan dengan rincian sebagaimana dijabarkan pada tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel. T-C.33 Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**18.095.780.383**				**18.928.500.000**
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Naker)	85 Indeks	**9.912.928.716**			85 Indeks	**9.540.500.000**
2	**07**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	10 Dok	**5.573.656**			10 Dok	**15.000.000**
2	07	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	3.503.656	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dok	7.500.000
2	07	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	2.070.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dok	7.500.000
2	**07**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standa	12 Laporan	**7.732.550.660**			12 Laporan	**8.076.000.000**
2	07	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	7,669,418,000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang/bulan	8,000,000,000
2	07	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	59.500.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 dok	70.000.000
2	07	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.632.660	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	6.000.000
2	**07**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	85 persen	**171.789.300**			85 persen	**342.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
2	07	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.043.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	17.000.000
2	07	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.148.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	50.000.000
2	07	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.041.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	10.000.000
2	07	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.445.100	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	50.000.000
2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.767.200	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Paket	25.000.000
2	07	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	4.800.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dok	15.000.000
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	76.545.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Laporan	175.000.000
2	**07**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	36 laporan	**1.807.139.700**			36 laporan	**617.500.000**
2	07	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	6.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	7.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
2	07	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	412.796.700	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	450.000.000
2	07	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.388.343.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 laporan	160.000.000
2	**07**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	58 unit	**195.875.400**			58 unit	**415.000.000**
2	07	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 unit	179.956.400	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	47 unit	150.000.000
2	07	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	15.919.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 unit	15.000.000
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Perusahaan yang Telah Menyusun Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	2 persen	**9.883.200**			2 persen	**15.000.000**
2	**07**	**02**	2,01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	3 perusahaan	**9.883.200**			3 perusahaan	**15.000.000**
2	07	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	3 Perusahaan	9.883.200	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Perusahaan	15.000.000
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Peserta Pelatihan Bersertifikasi Kompetensi	50 persen	**8.063.709.400**			50 persen	**9.015.000.000**
2	**07**	**03**	2,01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1 dok	**8.053.709.460**			1 dok	**9.000.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2384 Orang	8.053.709.460	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2384 Orang	9.000.000.000
2	**07**	**03**	2,02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1 dok	**9.999.940**			1 dok	**15.000.000**
2	07	03	2,02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 LPKS	9.999.940	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 LPKS	15.000.000
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	persentase pencari kerja yang sudah bekerja	50 %	**49.901.220**			50 %	**150.000.000**
2	**07**	**04**	2,01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	**14.999.800**			1 dok	**85.000.000**
2	07	04	2,01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 orang	14.999.800	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 orang	85.000.000
2	**07**	**04**	2,03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1 dok	**29.999.720**			1 dok	**45.000.000**
2	07	04	2,03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	29.999.720	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	45.000.000
2	**07**	**04**	2,04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	**4.901.700**			1 dok	**20.000.000**
2	07	04	2,04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	100 orang	4.901.700	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 orang	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Kasus yang terselesaikan	100 persen	**59.357.847**			100 persen	**208.000.000**
2	**07**	**05**	2,01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	**44.999.152**			1 Dok	**145.000.000**
2	07	05	2,01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 perusahaan	1,000,000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 perusahaan	25,000,000
2	07	05	2,01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 perusahaan	1.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 perusahaan	25.000.000
2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 dok	42.999.152	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dok	95.000.000
2	**07**	**05**	2,02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	**14.358.695**			1 Dok	**63.000.000**
2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Dibina	30 perusahaan	995,000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 perusahaan	35,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
2	07	05	2,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2 perkara	1.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 perkara	5.500.000
2	07	05	2,02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 organisasi	2.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 organisasi	5.500.000
2	07	05	2,02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 lembaga	9.461.695	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 lembaga	15.000.000
2	07	05	2,02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10 perusahaa n	902,000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 perusahaa n	2,000,000
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**2.812.101.112**				**2.685.000.000**
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	persentase koperasi aktif	89 persen	**34.999.890**			89 persen	**60.000.000**
2	**17**	**05**	2,01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen laporan tahunan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	**34.999.890**			1 Dok	**60.000.000**
2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 orang	34.999.890	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 orang	60.000.000
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Usaha Kecil dan Menengah	3 persen	**2.137.129.457**			3 persen	**2.530.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
2	**17**	**07**	2,01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah dokumen laporan tahunan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1 Dok	**2.137.129.457**			1 Dok	**2.530.000.000**
2	17	07	2,01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro lah wirausaha yang menerima hibah bantuan modal usaha	64 unit usaha 500 orang	2.137.129.457	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	64 unit usaha 500 orang	30.000.000
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	6 persen	**639.971.765**			6 persen	**95.000.000**
2	**17**	**08**	2,01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Jumlah dokumen laporan tahunan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1 Dok	**639.971.765**			1 Dok	**95.000.000**
2	17	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30 orang	639.971.765	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 orang	95.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**29.641.713.870**				**35.316.500.000**
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Peningkatan Pertumbuhan IKM	0,4 persen	**29.641.713.870**			0,4 persen	**35.305.500.000**
3	**31**	**02**	2,01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Penyusunan dan Evaluasi RPIK	1 Dok	**29.641.713.870**			1 Dok	**35.305.500.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
3	31	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8 dok	4.026.854.730	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8 dok	30.000.000.000
3	31	02	2,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 dok	25.409.859.140	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2 dok	5.000.000.000
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan Peran Serta Masyarakat	2 dok	200.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2 dok	200.000.000
3	31	02	2,01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dok	5.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dok	5.500.000
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**2.999.000**				**7.500.000**
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	persentase calon transmigran yang terfasilitasi	25%	**2.999.000**			25%	**7.500.000**
3	**32**	**03**	2,01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	1 Dok	**2.999.000**			1 Dok	**7.500.000**
3	32	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	2.999.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dok	7.500.000
							TOTAL	**50.552.594.365**				**56.937.500.000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN KUDUS

Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2023 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung atau secara tidak langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Program Pembangunan Daerah adalah Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program tersebut merupakan penjabaran kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2019 terdiri dari 10 (sepuluh) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 50.552.594.365,- (Lima Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKabupaten Kudus. Semua usulan program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Rencana Kerja (Renja) 2023 merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana Kerja hendaknya dikaitkan dengan penganggaran yang berbasis kinerja, sehingga ada keselarasan antara kebijakan, penganggaran, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Sistem perencanaan kerja ini dibangun untuk memperbaiki sistem pertanggungjawaban pejabat publik yang selama ini mengandung kelemahan. Selanjutnya melalui model atau sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang baik, akan dapat dibangun pilar-pilar kepemerintahan yang baik (good governance), yang salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahserta aparatur pembina. Dengan tersusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus ini dapat dijadikan acuan oleh seluruh jajaran di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan kegiatan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang tersusun ini masih jauh dari harapan dan diperlukan saran serta masukan yang dapat membantu penyempurnaannya di masa datang. Terlepas dari itu semua, kami juga berharap bahwa seluruh program kerja yang ada dalam Rencana Kerja ini akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan.

Kudus, Juli 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KUDUS

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS NAKERPERINKOP UKM

Dra. RINI KARTIKA HADI AHMAWATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19690120 199403 2 003

LAMPIRAN

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempu rn aan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				

Kudus, Juli 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KUDUS

Dra. RINI KARTIKA HADI AHMAWATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19690120 199403 2 003